

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Rauf, 1998, Perhitungan Cadangan Endapan Mineral, Jurusan Teknik Pertambang Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Abdul Rauf, 1999, Eksplorasi Tambang, Jurusan Teknik Pertambang Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Albert Berhard Duwith, 2010, Tesis Kajian Neraca Sumber daya Mineral Di Kabupaten Gunungkidul Daereah Istimewa Yogyakarta, Program Studi Magister Teknik Pertambang Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Anwar, Mohammad dkk. 2006. Identifikasi sektor industri dan Peranannya dalam peningkatan PAD Kabupaten Garut. Penelitian Peneliti Muda UNPAD.
5. Badan Standar Nasional Indonesia Amandemen I SNI 6728.4:2015, Penyusunan neraca spasial sumber daya alam - Bagian 4: Sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.
6. Gobel, Alieftiyani Paramita. 2016. Neraca Sumber daya dan Cadangan Mineral di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak dan Investasi. Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional XI “Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2016 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.
7. Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Lee, T.D., 1984, Planning and Mine Feasibility Study-an Owners Perspective, Proceedings of The 1984 NWMA, Short Course ‘Mine Feasibility-Concept to Completion’, Spokane, WA.
10. Machfud Sidik, 2002, Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Penciptaan Tujuan Nasional, Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta.
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
18. Pringgoprawiro H. 1983. Biostratigrafi dan Paleogeografi Cekungan Jawa Timur Utara Suatu Pendekatan Baru. PhD Thesis. Institut Teknologi Bandung.
19. Priyo Hari, Adi. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX. Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
20. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
21. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22. Van Bemmelen, R. W, 1949, The Geology of Indonesia, Vol. IA: General.